

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Blaang, Djemabut, C., Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Pokok, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).

Dunne, Van J.M. dan Van der Burght, Hukum Perjanjian, terjemahan Lely Niwan, (Medan: 1987).

Djumialdji, F.X., Perjanjian Pemborongan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Gautama, Sudargo, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

Kartasapoetra, G, Kartasapoetra, R.G., dan Kartasapoetra, A.G., Masalah Pertanahan di Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), halaman 67.

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981).

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: 1991).

Patrik, Purwahid, Hukum Perdata II, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1986).

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976).

Prodjodikoro, Wiryono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu, (Bandung: 1981).

Salindeho, John, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987).

_____, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Bathara, 1973).

_____, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas

Indonesia Press, 1981).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

_____, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, (Semarang: Aneka Ilmu).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Ketetapan MPR RI No. II/ MPR/ 1993, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/ 1986 Tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

C. MAJALAH/SURAT KABAR

Basjir, Wahyu, W. "Sisi Kelam Bisnis Perumahan", Kompas, 16 Juni 1995, halaman V, kolom 1-5.

Daftar Anggota REI Jawa Tengah Periode 1995.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara.

Shofie, Yusuf, "Ketidakadilan Dalam Kontrak Standard Perumahan", Warta Konsumen, Juni 1994, halaman 9-10.

Sensus Penduduk Kotamadya Semarang, Seri II.

